

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 silam dan juga krisis global pada tahun 2008, masih menyisakan dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Krisis ekonomi ini memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dipicu selama ini tidak didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh. Menurut para praktisi dan pakar ekonomi, hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya *A Good Corporate Governance*. Menurut artikel yang saya baca di internet (www.google.co.id), mengatakan bahwa krisis global belum membawa dampak yang begitu besar terhadap *A Good Corporate Governance* dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 2007.

Akuntan memegang peranan penting terhadap terlaksananya *A Good Corporate Governance* di perusahaan, terutama yang berprofesi sebagai auditor internal dimana dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas terhadap perusahaan. Auditor memiliki peranan yang penting dalam perwujudan *A Good Corporate Governance* karena auditor dapat berperan dalam mewujudkan *A Good Corporate Governance* secara efektif. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan penuh dari auditor internal, misalnya :

- Mendorong transparansi (*transparency*) dan integritas (*integrity*) dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*) perusahaan.
- Mendorong akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan aset perusahaan.
- Mendorong pertanggungjawaban (*responsibility*) perusahaan kepada public melalui *Corporate Social Responsibility* /CSR, *Community Development* atau Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL).
- Mendorong independensi (*independency*) perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas.
- Mendorong kewajaran (*fairness*) dalam pengadaan barang & jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU anti monopoli & persaingan usaha yang sehat.

Salah satu peran kunci audit internal adalah untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan kualitas kinerja perusahaan bagi manajemen. Auditor internal bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi, disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan. Auditor internal sebagai salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *A Good Corporate Governance*, saat ini telah berkembang menjadi komponen dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan secara sehat.

Governance dalam pengertian *Public Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber ekonomi unit sosial yang melibatkan sektor negara dan sektor

non negara dalam suatu usaha kolektif untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan *A Good Corporate Governance*. Kalangan bisnis umumnya menafsirkan *A Good Corporate Governance* sebatas bagaimana perusahaan meningkatkan laba, menempatkan manajer serta karyawan serta mencapai target usaha bahkan lebih ke pembagian kekuasaan. Di antara pejabat dan wakil rakyat umumnya menafsirkan *A Good Corporate Governance* sebagai suatu hal yang harus dimiliki perusahaan bermanfaat bagi pemerintah atau lingkungan. Seharusnya yang tepat adalah perpaduan antara kedua pernyataan tersebut.

Namun secara umum *A Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan serta mengakumulasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti auditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luar.

Pada KEP-117/M-MBU/2002 pasal 3, menetapkan beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membantu membangun suatu budaya yang sehat, yaitu : transparansi, kewajaran, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian. *A Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem guna mengendalikan dan mengarahkan semua jaringan hubungan formal-informal sektor korporasi, serta konsekuensinya bagi masyarakat umum.

Penelitian mengenai *A Good Corporate Governance* merupakan fenomena yang menarik di tengah perbincangan mengenai audit internal dewasa ini. Sejauh mana pengaruh audit internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN yang kini sedang menjadi tuntutan masyarakat luas. Perusahaan yang akan saya teliti adalah PT KAI (Persero)

Bandung (Bagian Satuan Pengawasan Intern) yang mempunyai alamat kantor di jalan perintis kemerdekaan no. 1 Bandung. PT KAI (Persero) Bandung adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi. Alasan penulis memilih PT. KAI (Persero) Bandung sebagai tempat penelitian adalah karena eksistensinya dan juga karena saya ingin mengetahui apakah penerapan *A Good Corporate Governance* sudah efektif atau tidak, dengan dipilihnya perusahaan ini maka diharapkan akan memperoleh data yang mencukupi, kemudian akan dianalisa lebih lanjut.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi ini yaitu :

“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PERWUJUDAN *A GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. KAI (Persero) Bandung”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Audit Internal pada PT. KAI (Persero) Bandung?
2. Bagaimanakah perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero) Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh Audit Internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero) Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyesuaikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan melakukan penelitian di perusahaan dan juga untuk mengetahui, mempelajari dan membandingkan teori dengan prakteknya terutama melalui kuesioner mengenai pengaruh Audit Internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero) Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menilai bagaimana pelaksanaan Audit Internal pada PT. KAI (Persero) Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menilai bagaimana perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero) Bandung.
3. Untuk menilai besarnya pengaruh Audit Internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero) Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang peranan Audit Internal dan pengaruhnya terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance*. Skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan pengumpulan dan pengolahan data menjadi informasi yang berguna sebagai bahan masukan dan diharapkan dapat membantu dalam terlaksananya *A Good Corporate Governance*.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini dan membantu pemahaman mengenai *A Good Corporate Governance*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

Alasan diadakannya audit adalah untuk memperbaiki kinerja unit organisasi. Suatu unit bisa berbentuk perusahaan, divisi, departemen, unit, seksi, proses bisnis, sistem atau proyek. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan kinerja unit yang telah diaudit, maka menunjang kearah perbaikan organisasi keseluruhan.

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah digariskan atau ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian audit, berikut ini adalah definisi audit menurut *The American Accounting Association Committee (AAA) on Basic Auditing Concept* yang dikutip dari **Robertson dan Louwers (2002:7)**, yaitu :

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions and established criteria and communicating the result to interested users”.

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses yang sistematis atas perolehan dan pengevaluasian bukti secara objektif mengenai asersi dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengguna yang tertarik. Selanjutnya, **Arens et al (2005:11)** mendefinisikan auditing sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person”.

Pernyataan di atas mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditentukan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Dari definisi yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diambil simpulan tentang beberapa karakteristik dari audit, yaitu :

1. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau informasi.
2. Adanya bukti audit (*evidence*), yang merupakan informasi atau keterangan yang digunakan oleh auditor untuk menilai tingkat kesesuaian suatu informasi.
3. Adanya tingkat kesesuaian informasi (*degree of correspondence information*) dan kriteria tertentu (*established criteria*).

4. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan audit. Seorang auditor harus kompeten dan independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya.
5. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Audit Internal

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan akan tercapai, pengendalian internal yang dilakukan secara terus-menerus memerlukan suatu pengawasan dari manajemen untuk menentukan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, manajemen memerlukan bagian khusus untuk melakukan penilaian atas pengendalian internal dan aktivitas-aktivitas perusahaan. Bagian ini adalah bagian audit internal, yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang yang bebas dari pengaruh departemen atau bagian-bagian lain yang diperiksanya.

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai audit internal, penulis mengutip beberapa pendapat yang berhubungan dengan audit internal ini.

Hiro Tugiman (2002:20) menyatakan bahwa internal audit atau audit internal adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan Internal adalah suatu fungsi yang ada di dalam organisasi yang berperan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau aktivitas atau program di dalam organisasi untuk

menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisnya kegiatan atau aktivitas atau program”.

Pelaksanaan audit internal tidaklah mudah, auditor internal harus memiliki kemampuan profesi yang memadai, dimana dia harus bertanggung jawab atas segala tugas dengan mendapat dukungan yang baik dari pihak manajemen.

Menurut **Sawyer (2003:6)** mengemukakan definisi audit internal sebagai berikut :

“Audit Internal is a systematic, objective appraisal by auditor internal of the operation and control within organization to determine whether : 1) Financial and operating information is accurate and reliable, 2) Risk acceptable internal policies and procedure are followed, 4) Satisfactory operating criteria are met, 5) Resources are used effectively achieved all for the purpose of as sitting members of the organization in the effective discharge of their responsibilities”.

Jika diterjemahkan secara bebas, audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang objektif dan sistematis oleh auditor internal tentang kegiatan dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan dan operasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi, peraturan, kebijakan dan prosedur telah ditaati, serta meyakinkan bahwa sasaran perusahaan telah dicapai secara efektif.

Menurut **Sukrisno Agoes (2004:221)** dalam bukunya *“Auditing (Pemeriksaan Akuntan)”*, mendefinisikan internal audit sebagai berikut :

“Internal Audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

The **IIA'S Board of Directors** telah memberikan definisi baru tentang *internal auditing* pada bulan Juni 1999. Definisi ini tidak hanya merefleksikan perubahan yang telah terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan auditor internal menuju peran yang lebih kuat dan berpengaruh pada masa yang akan datang. Definisi baru yang dikutip dari **Amin W. Tunggal (2005:3)** tersebut sebagai berikut :

“Internal auditing is an independent and objective assurance and consulting activities designed to add value and improve an organization's operations. It help an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes”.

Dari definisi di atas, maka dapat dikemukakan bahwa audit internal adalah:

- Suatu aktivitas pemeriksaan yang independen objektif.
- Aktivitas pemberian jaminan kelayakan dan konsultasi.
- Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan.
- Membantu organisasi dalam mencapai usahanya.
- Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan risiko manajemen, pengendalian, pengaturan dan pengelolaan organisasi.

2.1.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Tujuan audit internal adalah membantu semua tingkatan manajemen agar tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk maksud tersebut

audit internal menyajikan analisis-analisis, penilaian, saran-saran, bimbingan-bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah, dipelajari dan dinilainya.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8) menyatakan bahwa :

“Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Charter Audit Internal*, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.

Tujuan audit internal sebenarnya sudah tersirat dalam definisi audit internal itu sendiri, yaitu membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi perusahaan yang diperiksannya.

2.1.2.3 Fungsi Audit Internal

Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep mengenai audit internal identik dengan auditing yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Perbedaannya hanyalah bahwa pelaksanaannya adalah pegawai perusahaan itu sendiri. Akan tetapi dalam perusahaan-perusahaan besar jangkauan internal auditor itu lebih luas daripada hanya sekedar verifikasi terhadap buku besar dan catatan-catatan yang berkaitan lainnya. Jika jauh lebih luas daripada hanya sekedar menilai kualitas pencapaian berbagai orang diorganisasi, dalam melaksanakan tanggung jawab

yang dibebankan kepadanya mereka tidak hanya atau harus membatasi diri hanya pada pencarian rutin untuk menemukan kesalahan.

Menurut **IIA (2001:319.30)** dalam Standar Professional Akuntan Publik, memberikan pernyataan mengenai fungsi audit internal, sebagai berikut :

“Fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktivitas audit intern dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian intern, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain dan operasi pengendalian intern. Mereka mengkomunikasikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan internal meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu, seperti penilaian efisiensi prosedur yang telah ditetapkan dan pengembangan serta penyempurnaan prosedur tersebut.
2. Penilaian terhadap data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan membuat analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan tertentu.
3. Penilaian kegiatan yang menyangkut ketaatan terhadap kebijakan, peraturan pemerintah dan kewajiban-kewajiban dengan pihak luar.

Sebagian tugas dari audit internal adalah membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, dengan cara melakukan audit dan penilaian secara objektif, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil auditnya. Karena tugas auditor internal adalah mengaudit dan meneliti seluruh kegiatan perusahaan, seorang auditor internal harus menguasai seluruh aspek dalam

ruang lingkup perusahaan, baik yang berhubungan dengan prosedur-prosedur akuntansi dan keuangan, produksi-produksi, pengembangan, penjualan dan pemasaran, teknik, dan lain-lain.

2.1.2.4 Tanggung Jawab Audit Internal

Tanggung jawab audit internal dalam perusahaan haruslah ditetapkan dengan jelas dengan kebijakan manajemen. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal itu untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang sedang direview. Auditor internal harus bebas untuk mereview dan menilai kebijakan, rencana, prosedur dan catatan. Seperti yang dikemukakan oleh **IAI (2001:322.1)** dalam Standar Profesional Akuntan Publik, sebagai berikut :

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen, satuan usaha dan dewan komisaris dan pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian entitas”.

Menurut **Amin Widjaja Tunggal (2005:21)**, tanggung jawab departemen audit tersebut :

- “1. Tanggung jawab direktur Audit Internal adalah menerapkan program Audit Internal, mengarahkan personil dan aktivitas-aktivitas departemen Audit Internal, juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan. Dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.**
- 2. Tanggung jawab Auditing Supervisor adalah membantu direktur Audit Internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu dalam mengkoordinasikan usaha auditing dengan**

auditor independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha.

- 3. Tanggung jawab staff auditor dalam pekerjaan lapangan audit.**
- 4. Tanggung jawab staff auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu lokasi audit.”**

Atas dasar penjelasan mengenai fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab auditor internal, dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan fungsi staf yang lepas dari fungsi administratif atau pencatatan dan fungsi keuangan. Oleh karena itu, auditor internal tidak mempunyai wewenang untuk memberi perintah langsung (*line authority*) pada pegawai-pegawai bidang operasi.

Dengan demikian, jelas bahwa audit internal hanya bertanggung jawab sebatas penilaian yang dilakukannya, sedangkan tindakan koreksinya merupakan tugas dari manajemen.

2.1.2.5 Independence (Independensi)

Auditor internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan kegiatannya, hal ini berarti auditor internal dalam memberikan penilaian tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dapat dicapai apabila audit internal diberikan status dan kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan oleh IIA (1996:914) sebagai berikut :

“Internal auditors should be independent of the activities they audit. Internal auditors are independent when they can carry out their work freely and objectively. Independence permits Internal auditors to render the impartial and unbiased judgements essential to the proper conduct of audits. It is achieved through organization status and objectivity”.

Independensi menyangkut dua aspek menurut IIA, yaitu :

1. *Organizational Status* (Status Organisasi)

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan Auditor internal harus mempunyai dukungan dari manajemen senior dan dewan direksi, sehingga mereka akan mendapatkan kerjasama dari pihak yang akan diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

2. *Objectivity* (Objektivitas)

Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan pemeriksaan secara objektif.

- a. Objektivitas adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (*internal auditor*) dalam melaksanakan pemeriksaan. Para internal auditor tidak boleh menempatkan lebih rendah penilaian mereka sehubungan dengan pemeriksaan (*audit*) yang dilakukan oleh pihak lain.
- b. Objektivitas mengharuskan para auditor internal melaksanakan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau diragukan. Para internal auditor tidak boleh ditempatkan dalam situasi, dimana mereka merasa tidak dapat untuk membuat penilaian objektif profesional.
- c. Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau berkurang bila auditor merekomendasikan suatu standar pengawasan bagi sistem-sistem atau prosedur peninjauan (*review*) sebelum hal-hal tersebut diterapkan. Mendesain, instalasi dan sistem-sistem operasi bukanlah fungsi-fungsi dari

audit, begitu juga halnya dalam pengkonsepan prosedur-prosedur untuk sistem. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini diasumsikan dapat mengganggu objektif audit.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8), menyatakan bahwa :

“Fungsi Audit Internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.

Dengan adanya independensi dan objektivitas yang dimiliki auditor internal, diharapkan audit yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan hasil audit akan objektif.

2.1.2.6 Professional Proficiency (Kemampuan Profesional Audit Internal)

Kemampuan profesional menurut *Institute of Internal Auditors* yang dikutip oleh **Ratliff (1996:918)** dalam bukunya *“Internal Auditing : Principles and Techniques”*, adalah sebagai berikut :

“Internal audits should be performed with proficiency and due professional care. Professional proficiency is the responsibility of the internal auditing department and each internal auditor. The department should assign to each audit those persons who collectively possess the necessary knowledge, skills, and disciplines to conduct the audit properly”.

(“Audit internal seharusnya dilaksanakan dengan kemampuan dan kehati-hatian profesional. Kemampuan profesional ialah pertanggungjawaban dari departemen audit internal dan tiap internal auditor. Departemen audit internal seharusnya menugaskan setiap audit kepada mereka yang secara kolektif memiliki pengetahuan-pengetahuan penting, kemampuan, dan disiplin untuk melaksanakan audit dengan tepat”)

Menurut IIA, kemampuan profesional mencakup :

1. *The Internal Auditing Department* (Bagian Audit Internal), harus :
 - a. Memberikan jaminan atas kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
 - b. Memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.
 - c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.
2. *The Internal Auditor* (Auditor Internal), harus :
 - a. Mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.
 - b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 - c. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
 - d. Meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan berkelanjutan.
 - e. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melakukan pemeriksaan.

2.1.2.7 *Scope of Work (Ruang Lingkup Audit Internal)*

Audit internal telah semakin penting dan diperlukan dengan bertambahnya ruang lingkup perusahaan, serta semakin luas dan kompleksnya dunia usaha. Demikian pula manajemen perlu mendelegasikan wewenang pada bawahannya untuk menciptakan pengendalian yang baik mengenai pelaksanaan operasi secara langsung. Dengan demikian diperlukan suatu alat penghubung untuk menjembatannya, yaitu suatu pengujian yang cukup bebas dari organisasi ini. Di samping itu juga diperlukan penekanan-penekanan agar kegiatan usaha berjalan lancar.

Ruang lingkup pekerjaan audit internal menurut *The Institute of Internal Auditors* yang dikutip oleh **Ratliff (1996:912)** dalam bukunya "*Internal Auditing : Principles and Techniques*", adalah sebagai berikut :

"The scope of Internal auditing encompasses the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization systems of internal control and the quality of performances in carrying out assigned responsibilities. The scope of internal auditing includes :

- 1. Reviewing the reliability and integrity of financial and operating information and the means used to identify, measure, classify and report such information.***
- 2. Reviewing the system established to ensure compliance with theme, policies, plans, procedures, laws and regulation which could have a significant in operation and report and determining wether the organization is an compliance.***
- 3. reviewing the means of safe guarding assets and as appropriate, verifying the existence of such assets.***
- 4. Appraising the economy and efficiency with which resources are employed.***
- 5. Reviewing operations or programs to ascertain wether results are consistant with establish objectives and goals and which the operations or program are being carried out as planned".***

Pernyataan tersebut dapat diartikan ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan keefektifan sistem-sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Ruang lingkup audit internal meliputi :

1. Meninjau ulang reliabilitas dan integritas keuangan serta mengoperasikan informasi dan pengertian-pengertian yang dulu mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi sejenis.
2. Meninjau ulang sistem yang dibuat untuk menjamin kepatuhan terhadap tema, kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang mungkin penting dalam operasi serta melaporkan dan memutuskan apakah organisasi merupakan suatu kepatuhan.
3. Meninjau ulang pengamanan aset dan tepatnya, memverifikasi, memeriksa keberadaan aset-aset tersebut.
4. Menilai perekonomian dan efisiensi atas sumber-sumber yang digunakan.
5. Meninjau ulang operasi-operasi atau program-program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta operasi atau program mana yang sedang dilaksanakan sesuai rencana.

2.1.2.8 Performance of Audit Work (Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal)

Pernyataan mengenai pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh *The Institute of Internal Auditors (1996:932)*, adalah sebagai berikut :

“Audit work should include planning the audit, examining and evaluating information, communicating results, and following up. The internal auditor is responsible for planning and conducting the audit assignment, subject to supervisory review and approval”.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut IIA, meliputi :

1. *Planning the Audit* (Perencanaan Pemeriksaan)

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus meliputi :

- a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.
- b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diaudit.
- c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
- e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, resiko-resiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.
- f. Penulisan program pemeriksaan.
- g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.
- h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.

2. *Examining and Evaluating Information* (Pengujian dan Pengevaluasian Informasi)

Internal auditor haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil

pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi, adalah sebagai berikut :

- a. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang lingkup kerja harus dikumpulkan.
- b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
- c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, hanya terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.
- d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif auditor harus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.
- e. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan.

3. *Communicating Results* (Penyampaian Hasil Pemeriksaan)

Internal auditor harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

- a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (*audit examination*) selesai dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau informal.
- b. Internal auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir.
- c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.
- d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat auditor.
- e. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.
- f. Pandangan dari pihak *auditee* tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit.
- g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.

4. *Following Up* (Tindak Lanjut Hasil Audit)

Internal auditor harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Internal auditor harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima resiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atau temuan yang dilaporkan.

2.1.2.9 Management of the Internal Auditing Department (Manajemen Bagian Audit Internal)

Pernyataan yang dikemukakan oleh IIA (1996:946) dalam “*Standars for The Professional Practice of Internal Auditing*”, adalah :

“The director of internal auditing should properly manage the internal auditing department. The director of internal auditing is responsible for properly managing the department so that :

- 1. Audit work fulfills the general purposes and responsibilities approved by senior management and accepted by the board.***
- 2. Resources of the internal auditing department are efficiently and effectively employed.***
- 3. Audit work conforms to the Standars for The Professional Practice of Internal Auditing”.***

Menurut IIA, pimpinan audit internal harus :

1. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk bagian audit internal.
2. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.

3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staff auditor.
4. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumberdaya manusia pada bagian audit internal.
5. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.
6. Menetapkan dan mengembangkan berbagai kegiatan dari bagian audit internal.

2.1.2.10 Kompetensi

Kualifikasi Audit Internal menurut **Amin W. Tunggal (2000:22-27)**, antara lain :

- “1. Auditor internal harus memiliki pendidikan dan latihan yang memadai, karena audit berhubungan dengan analisis dan pertimbangan. Oleh karena itu auditor internal harus mengerti catatan keuangan dan akuntansi sehingga dapat memverifikasi dan menganalisis dengan baik.**
- 2. Selain pendidikan dan pelatihan seorang auditor internal juga harus berpengalaman di bidangnya. Apabila ia seorang auditor internal yang baru, ia harus dibimbing oleh auditor yang kompeten.**
- 3. Seorang auditor dikatakan kompeten bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :**
 - a. Auditor internal harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi perusahaan, selain itu juga harus mempunyai perhatian terhadap prestasi dan persoalan karyawan perusahaan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas.**
 - b. Seorang auditor internal harus tekun dalam menjalankan pekerjaannya.**
 - c. Auditor Internal juga harus memandang suatu kesalahan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat sebisa mungkin dihindari.**

- d. Auditor internal harus menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap profitabilitas dan efisiensi kegiatan perusahaan.
 - e. Mempertimbangkan auditee sebagai mitra, karena tujuan dari audit internal bukan mengkritik tetapi untuk meningkatkan operasi perusahaan.
4. Seorang auditor internal harus mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk membangun organisasi.”

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9), menyatakan

bahwa :

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.

1. **Keahlian**
Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
2. **Kecermatan Profesional**
Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang bijaksana dan kompeten, dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan; kecukupan dan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses governance; biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan; penggunaan teknik-teknik audit berbasis komputer dan teknik-teknik analisis lainnya.
3. **Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL)**
Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.”

2.1.2.11 Program Audit Internal

Ada beberapa definisi mengenai program audit, diantaranya dikemukakan oleh Moeller dan Witt (1999:10-20), adalah sebagai berikut :

“The audit program is a tool for planning, directing, and controlling audit work a blueprint for action, specifying the procedures to be followed and delineating steps to be performed to meet audit objective”.

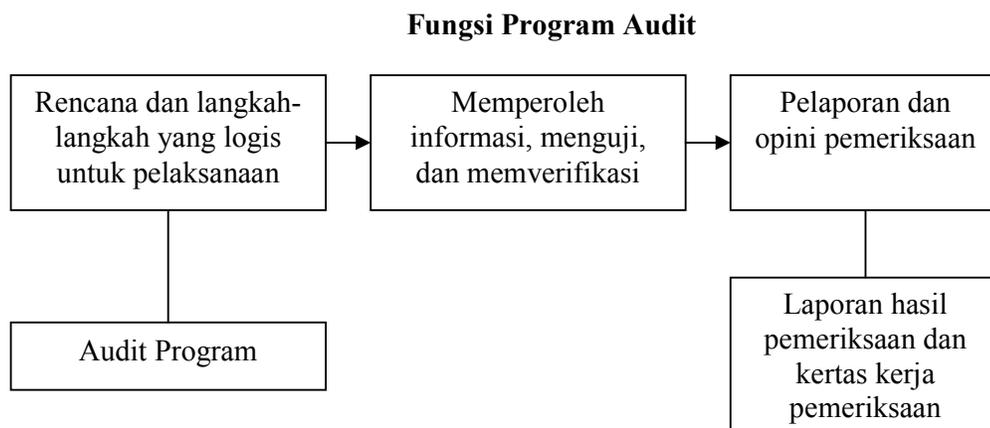
Berdasarkan pernyataan di atas, program audit merupakan alat untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian pekerjaan audit dan merupakan pedoman untuk tindakan, mengurutkan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan dan menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan audit.

Selanjutnya program audit menurut **Mulyadi (2002:100)**, adalah sebagai berikut :

“Program pemeriksaan atau program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu”.

Fungsi program audit dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



Sumber : **Amin W. Tunggal (2000:33)**

Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004:15), mendefinisikan program audit sebagai berikut :

“Dalam merencanakan penugasan auditor internal harus mempertimbangkan sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan”.

2.1.2.12 Pelaksanaan Audit Internal

Pemeriksa internal (Internal auditor) bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau direview oleh pengawas.

2.1.2.13 Laporan Hasil Audit Internal

Penyusunan laporan hasil audit merupakan fase terpenting dari proses audit internal secara keseluruhan. Laporan pemeriksaan merupakan laporan yang ditujukan kepada manajemen, dari laporan tersebut manajemen dapat menilai hasil kerja auditor internal dan mengevaluasi rekomendasinya.

Laporan hasil audit menurut **Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004:16-17)** adalah :

“Auditor internal mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.

1. Kriteria komunikasi

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya.

- a. Komunikasi akhir penugasan bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan simpulan auditor internal.**
- b. Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang direview.**
- c. Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak diluar organisasi, maka pihak yang berwenang harus**

menetapkan pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya.

2. Kualitas komunikasi

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, ringkas, jelas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu. Dan jika terjadi kesalahan, penanggung jawab audit internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang telah menerima komunikasi sebelumnya.

3. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan :

- a. Standar yang tidak dipatuhi
- b. Alasan ketidakpatuhan, dan
- c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan”.

2.1.2.14 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal

Tindak lanjut audit internal merupakan tahapan yang penting dari seluruh proses audit, karena dalam tahap ini, objek yang diperiksa mengambil langkah dan tindakan perbaikan.

Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004:18), menyatakan bahwa :

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung resiko karena tidak melakukan tindak lanjut”.

2.1.3 *A Good Corporate Governance*

2.1.3.1 Sejarah *A Good Corporate Governance*

Sejarah lahirnya *A Good Corporate Governance* menurut **I Nyoman Tjager dkk (2003:23-24)** berawal dari pengelolaan perusahaan yang menuntut pertanggungjawaban kepada pemilik yang dahulu dikenal dalam *agency theory*,

kemudian dikembangkan dalam teori birokrasi Weber. Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, *A Good Corporate Governance* sudah dipraktikkan di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa sekitar stengah abad lalu (1940-an). Pada masa itu, agar perusahaan-perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya, maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola sebuah negara.

Konsep pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) para pemegang saham dan pengendalian (*control*) para manajemen dalam korporasi telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Permasalahan yang kemudian timbul dari pemisahan ini adalah para Dewan (baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi) apakah para Dewan benar-benar bertindak bagi kepentingan para pemegang saham. Untuk menanggapi masalah ini berkembanglah teori agensi (*agency theory*) pada tahun 1970-an. Para penganjur teori mengatakan bahwa para dewan secara rasional akan bertindak bukan saja bagi kepentingan pemegang saham tetapi juga bertindak bagi para manajemen puncak. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem *Checks and Balance* untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dari teori agensi itulah *Corporate Governance* muncul di akhir tahun 1980-an, yang kemudian diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa. Umumnya perkembangan *A Good Corporate Governance* terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara. Di Asia krisis ekonomi melanda dipandang sebagai akibat lemahnya praktek *A Good Corporate Governance*. Kini konsep *A Good Corporate Governance* dengan cepat diterima oleh kalangan bisnis maupun

masyarakat luas, bahkan bagus atau tidaknya kinerja suatu perusahaan ditentukan sejauh mana perusahaan tersebut menerapkan *A Good Corporate Governance*.

2.1.3.2 Pengertian *A Good Corporate Governance*

Dunia usaha di Indonesia telah mengalami kemuraman sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya krisis adalah tata kelola yang rendah, baik untuk organisasi sektor publik maupun sektor swasta.

Konsep *A Good Corporate Governance* yang kini muncul adalah sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan yang tidak sehat. Meskipun *A Good Corporate Governance* bukan suatu konsep baru, tetapi masih saja salah dalam menafsirkan *A Good Corporate Governance*, karena mereka menafsirkan *A Good Corporate Governance* sesuai dengan kepentingannya. Terdapat beberapa pengertian untuk *A Good Corporate Governance*.

Corporate Governance menurut **Iman S. Tunggal** dan **Amin W. Tunggal (2001:1)** adalah :

“Sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier atau pemasok, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas”.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menafsirkan *A Good Corporate Governance* yang dikutip dari **Iman S. Tunggal** dan **Amin W. Tunggal (2002:1)** sebagai berikut :

“Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in corporation, such as, the board managers, shareholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affair. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives and monitoring performance”.

Pernyataan tersebut dapat diartikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, direksi, dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga menyarankan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan insentif yang baik bagi direksi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dikutip dari I Nyoman Tjager, dkk (2003:26) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (shareholders)”.

World Bank (Bank Dunia) mendefinisikan *A Good Corporate Governance*, dikutip dari Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2004:4) sebagai berikut :

“Corporate Governance adalah sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja

sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.

Sedangkan definisi *A Good Corporate Governance* menurut *The European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) Professional Standards – Corporate Governance Guidelines* (<http://www.evca.com>) (2005:3), adalah sebagai berikut :

“Corporate Governance is one key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. Corporate governance involves a set of relationships between a company management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined”.

(“Corporate Governance merupakan satu elemen kunci dalam memperbaiki efisiensi perekonomian dan pertumbuhan layaknya mempertinggi kepercayaan diri investor. Corporate Governance mencakup seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, para dewan , para pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Corporate Governance juga menetapkan struktur kemudian tujuan perusahaan yang disusun, dan makna-makna dalam mencapai tujuan dan memantau pelaksanaan yang ditetapkan”)

A Good Corporate Governance merupakan sistem tentang bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Struktur *A Good Corporate Governance* mencakup pengertian sebagai berikut :

1. Adanya pemisahan hak dan pertanggungjawaban antara pelaku dalam perusahaan seperti manajemen, pemegang saham, dan *stakeholders*. Di samping itu harus terdapat pemisahan yang jelas pula antara manajemen dan pemilik perusahaan.

2. Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.
3. Memperbaiki efisiensi perekonomian dan meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
4. Menciptakan nilai tambah dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5. Mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).

2.1.3.3 Prinsip-prinsip *A Good Corporate Governance*

Organization for Economic Corporation and Development (OECD)

(dikutip dari Majalah USAHAWAN NO. 10 TH XXIX) (2000:26), menyatakan terdapat lima prinsip *A Good Corporate Governance*, yaitu :

- “1. **Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.**
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governnace* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, (5) memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.

2. **Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.**

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan self dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. **Peranan Stakeholders yang terkait dengan perusahaan.**

Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
4. **Keterbukaan dan transparansi.**

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
5. **Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*)**

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya”.

Principles of Good Governance menurut *EVCA Professional Standards Corporate Governance Guidelines* (<http://www.evca.com>) (2005:5), terdiri dari tujuh prinsip sebagai berikut :

- “1. Laws and regulations**
- 2. Integrity**
- 3. Partnership**
- 4. The long term view**
- 5. Respect for stakeholders**
- 6. Transparency**
- 7. Confidentiality”.**

Sedangkan I Nyoman Tjager menyimpulkan ada empat prinsip utama *A Good Corporate Governance*, yaitu : kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*).

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *A Good Corporate Governance*, pada pasal 3 juga ditetapkan prinsip-prinsip *A Good Corporate Governance*, yang meliputi :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan Perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.4 Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan kepada *stakeholders* dalam mengelola perusahaan.

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan, yaitu :

- 1) Hasil operasi dan keuangan perusahaan,
- 2) Tujuan perusahaan,
- 3) Kepemilikan saham,
- 4) Anggota Dewan Eksekutif,
- 5) Faktor yang dapat diperkirakan dan material,
- 6) Isu-isu material yang berkenaan dengan pegawai dan *stakeholders* yang berkepentingan,
- 7) Struktur dan kebijakan pengelolaan perusahaan.

Informasi harus disiapkan, diaudit dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang bermutu tinggi baik itu informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen untuk memberikan keyakinan yang memadai dan objektivitas dari laporan keuangan yang disusun dan disajikan.

2.1.3.5 Kemandirian (*Independence*)

Kemandirian berarti suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

2.1.3.6 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berarti kejelasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pelaksanaan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Dewan bertanggung jawab untuk memantau kinerja pencapaian target *return* bagi pemegang saham, sekaligus mencegah berlarutnya konflik berkepentingan serta menjaga kompetensi yang adil dalam perusahaan. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik, anggota dewan harus berlaku sebagai berikut :

- 1) Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap,
- 2) Dewan harus mendengarkan keluhan pemegang saham,

- 3) Dewan harus menjamin ketaatan pada hukum yang ditetapkan dan perlindungan terhadap para pemegang saham,
- 4) Dewan harus melakukan beberapa fungsi, yakni :
 - a. Melakukan *review* atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana utama, kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, pemantauan kinerja perusahaan,
 - b. Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau sampai rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai,
 - c. Melakukan *review* atas gaji eksekutif dan memastikan proses pencalonan anggota dewan secara terbuka,
 - d. Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen, dewan dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan transaksi dengan berbagai pihak,
 - e. Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan finansial perusahaan, melalui audit yang independen dan juga memastikan sistem pengendalian tepat berada di tempatnya.
 - f. Mengawasi proses transparansi dan komunikasi, serta dewan harus mampu menggunakan pertimbangan yang objektif.

2.1.3.7 Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggung jawaban berarti kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporat yang sehat.

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

2.1.3.8 Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul dalam penyajian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak pemegang saham antara lain :

- 1) Keamanan dalam metode pendaftaran kepemilikan,
- 2) Informasi yang diterima tepat waktu,
- 3) Partisipasi dan hak dalam *voting* dalam RUPS,
- 4) Memilih anggota Dewan,
- 5) Mendapat deviden,
- 6) Berpartisipasi menentukan arah perusahaan,
- 7) Mendapatkan informasi yang akurat dan seimbang.

Keadilan itu dapat diwujudkan dengan cara :

- 1) Kesetaraan dalam pemuasan keluhan,
- 2) Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaan,
- 3) Pelarangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.1.3.9 Unsur-unsur *A Good Corporate Governance*

Unsur-unsur (*person in charge*) dalam *A Good Corporate Governance* menurut **Iman S. Tunggal** dan **Amin W. Tunggal (2002:36-49)** dan juga menurut **IIA Indonesia (2004:2-3)**, terdiri atas :

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Hak pemegang saham harus dilindungi, agar pemegang saham dapat melaksanakannya berdasarkan prosedur yang benar dan ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak para pemegang saham pada dasarnya adalah :

- 1) Mengamankan registrasi dan kepemilikan saham;
- 2) Menyerahkan atau memindahkan saham;
- 3) Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinyu;
- 4) Ikut serta dan memiliki hak suara dalam RUPS;
- 5) Menerima keuntungan, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

Dalam suatu RUPS, pemegang saham harus menetapkan sistem tentang :

- 1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perusahaan;

- 2) Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi; dan
- 3) Penilaian kinerja mereka.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang saham dalam mengawasi tindakan direksi, dan jika perlu dapat memberikan nasihat kepada Direksi.

Fungsi dewan komisaris ialah sebagai wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- (1) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan serta perubahan dan tambahannya.
- (3) Mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada RUPS.

- (4) Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- (5) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan.
- (6) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- (7) Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi.

3. Direksi

Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan. Direksi wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan Direksi harus memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan *stockholders*.

4. Eksternal Auditor

Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. Eksternal audit

bertanggung jawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan eksternal auditor adalah bentuk dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan tanggung jawab manajemen, tetapi eksternal auditor bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit mereka.

5. Komite Audit

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit beranggotakan satu atau lebih Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang sekaligus, seoran diantaranya merupakan Komisaris independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern perusahaan yang independen dimana setidaknya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit :

- 1) Mendorong terbentuknya pengendalian internal yang memadai;
- 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dalam laporan keuangan;
- 3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit serta kemandirian dari objektivitas eksternal audit.
- 4) Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua Komite Audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor,

surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham.

6. Auditor Internal

Didalam perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *A Good Corporate Governance*, fungsi audit internal antara lain berperan dalam :

- 1) Membantu manajemen dalam menilai resiko-resiko utama yang dihadapi perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen.
- 2) Mengevaluasi struktur pengendalian internal dan bertanggung jawab kepada Komite Audit.
- 3) Menelaah peraturan *Corporate Governance* minimal setahun sekali.

7. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang pejabat perusahaan yang khusus untuk melaksanakan fungsinya. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi perusahaan.

8. Manajer dan Pekerja

Manajer bertanggung jawab untuk :

- 1) Kelangsungan hidup perusahaan.
- 2) Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar, serta cara lain yang dapat digunakan untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
- 3) Menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Pekerja, khususnya yang diwakili oleh serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan.

9. *Stakeholders* Lainnya

Stakeholders diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan masukan kepada Direksi mengenai hal tersebut. Perusahaan juga harus memberikan informasi yang diperlukan oleh *stakeholders* demi kepentingan bersama.

Pemerintah terlibat dalam *A Good Corporate Governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberi pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

2.1.3.10 Tujuan dan Manfaat Penerapan *A Good Corporate Governance*

Perwujudan *A Good Corporate Governance* menurut **Iman S. Tunggal** dan **Amin W. Tunggal (2002:9)**, akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- “1. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi**
- 2. Peningkatan citra perusahaan**
- 3. Peningkatan kepuasan pelanggan**
- 4. Lebih dipercaya oleh investor**
- 5. Fokus pada strategi-strategi utama”.**

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* (2003:26), tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sedangkan menurut situs internet <http://www.oecd.com>, tujuan utama dari *A Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“The main goal of corporate governance is to ensure that goals of the management of the corporation are in line with the goals of the other major stakeholders”.

Manfaat dari penerapan *A Good Corporate Governance* menurut **I Nyoman Tjager, dkk (2003:96)**, antara lain :

1. Meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen, termasuk biaya sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
2. Meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditor.
3. Meningkatkan nilai perusahaan.

4. Mengangkat Citra perusahaan.

Secara mikro, *A Good Corporate Governance* bagi perusahaan-perusahaan adalah efektivitas dan efisiensi. Sedangkan secara makro, *A Good Corporate Governance* mendorong perusahaan untuk turut serta membantu perbaikan ekonomi negara dan masyarakat. Jadi apabila dirangkum, manfaat *A Good Corporate Governance* adalah :

1. Entitas bisnis akan lebih efisien.
2. Meningkatkan kepercayaan publik.
3. Menjaga going concern perusahaan.
4. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan produktivitas.
6. Mengurangi distorsi (*management risk*).
7. Melindungi para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

2.1.3.11 Peranan Audit Internal dalam Mewujudkan *A Good Corporate Governance*

Dalam mewujudkan *A Good Corporate Governance* sangat dibutuhkan peranan akuntan perusahaan, baik peran akuntan manajemen maupun peran auditor internal. Adapun auditor internal yang bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi di samping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan. Auditor internal sebagai salah satu profesi yang menunjang dalam meningkatkan *A Good Corporate Governance* pada

perusahaan. Saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan yang sehat dan dinamis.

Keterkaitan antara audit internal dengan *A Good Corporate Governance* bisa dilihat dari definisi, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tugas dan tanggung jawab audit internal dihubungkan dengan prinsip-prinsip *A Good Corporate Governance*. Dilihat dari definisinya, audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta meningkatkan kegiatan operasi perusahaan. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian serta proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Dari definisi itu juga tersirat tujuan audit internal, yaitu membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif, dengan jelas memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi atau aktivitas perusahaan yang diperiksanya. Ada empat aktivitas utama audit internal, yaitu *compliance*, *operational*, *verification*, dan *evaluation*. Sudah tampak suatu hubungan antara audit dengan prinsip-prinsip *A Good Corporate Governance*. Semua aktivitas, tujuan dan ruang lingkup audit internal dapat mendukung terwujudnya *A Good Corporate Governance*.

Audit internal yang dapat meningkatkan perwujudan *A Good Corporate Governance* tersebut adalah yang benar-benar diyakini telah memadai. Dapat disimpulkan ciri-ciri audit internal yang memadai yaitu adanya kualifikasi audit internal (independensi, objektivitas serta profesionalisme auditor internal), struktur organisasi serta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari bagian

audit internal, program audit internal, laporan hasil audit internal, serta tindak lanjut atas laporan hasil audit internal.

Selanjutnya, perwujudan *A Good Corporate Governance* akan efektif bilamana terdapat adanya unsur-unsur *A Good Corporate Governance*, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Jadi audit internal yang memadai sangat berperan dalam mewujudkan *A Good Corporate Governance*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, keruntuhan ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia, yang dimulai pada pertengahan 1997 menunjukkan rapuhnya struktur ekonomi bangsa dimana roda bisnis perekonomian dijalankan oleh manajemen yang acak-acakan dan sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dapat disimpulkan bahwa audit internal sangat berpengaruh bagi seluruh bidang yang ada di dalam maupun diluar perusahaan. Pada awal perkembangannya, audit internal merupakan suatu aktivitas pengecekan ketepatan perhitungan matematis yang bertujuan agar setiap orang bersikap jujur. Kini audit internal merupakan alat yang independen yang dapat menghubungkan pimpinan perusahaan dengan setiap bidang aktivitas perusahaan, sehingga pada akhirnya pihak manajemen dapat memberikan penilaian terhadap operasi perusahaan maupun catatan *finacial* perusahaan.

Definisi Audit Internal yang disetujui oleh IIA *Board of Directors* pada bulan Juni 1999 tidak hanya merefleksikan perubahan yang telah terjadi dalam profesi, definisi ini juga mengarahkan auditor internal menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada masa yang akan datang, definisi tersebut adalah :

“Internal Auditing is an independent, objective assurance and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

(dikutip oleh Boynton –William, 2001 : 980)

Dari definisi diatas mencerminkan bagaimana suatu audit internal dapat berfungsi demi tercapainya tujuan perusahaan, serta mengevaluasi dan meningkatkan kepentingan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi.

Agar terciptanya audit internal (pemeriksaan intern) yang baik, maka perlu dipenuhi suatu kriteria atau standar. Salah satu standar yang digunakan adalah *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang dikeluarkan oleh IIA (*The Institute of Internal Auditors*) sebagai berikut :

1. *Independence* (Independensi)

Independensi harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya dan memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*). Audit Internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.

2. *Professional Proficiency* (Kemampuan Profesional)

Audit Internal harus dilakukan dengan keahlian dan ketelitian profesional.

3. *Scope of Work* (Lingkup Kerja)

Lingkup pekerjaan auditor internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

4. *Performance of Audit Work* (Pelaksanaan Kegiatan Audit)

Kegiatan audit harus meliputi perencanaan audit (*Audit Program*), pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil (*Reporting*), dan menindaklanjuti (*Following Up*).

5. *Management of The Internal Auditing Departement* (Manajemen Bagian Audit Internal)

Pimpinan Audit Internal harus mengelola bagian Audit Internal secara tepat.

Adapun kriteria lainnya yang digunakan adalah Kriteria Audit Internal yang Memadai yang dikeluarkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations*) sebagai berikut :

- Kualifikasi Audit Internal

1. Independensi Auditor Internal

Syarat audit internal yang memadai adalah harus memiliki auditor internal yang independen dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga tujuan audit dan tujuan perusahaan dapat tercapai.

2. Kompetensi Auditor Internal

Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas audit internal.

- Pelaksanaan Audit Internal

1. Program Audit Internal

Untuk mencapai hasil audit yang memuaskan seorang auditor internal harus membuat program pemeriksaan sebagai pemandu pemeriksaan dalam melaksanakan audit.

2. Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit internal harus meliputi perencanaan audit, menguji dan mengevaluasi informasi, melaporkan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

3. Laporan Hasil Audit Internal

Tahap akhir yang dilakukan oleh pemeriksa adalah membuat laporan hasil kegiatan pemeriksaan. Laporan hasil audit internal yang baik minimal harus memiliki verifikasi, objektif, dan lengkap dalam unsur penyajiannya sehingga memudahkan dalam pengambilan suatu kesimpulan dan pemberian rekomendasi.

4. Tindak Lanjut Audit Internal

Auditor internal harus melaporkan tindak lanjut pemeriksaan untuk memastikan tindakan-tindakan perbaikan yang memadai telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dikemukakan dalam pemeriksaan.

A Good Corporate Governance diartikan secara sempit sebagai sistem pertanggungjawaban resmi direksi kepada pemegang saham. Secara luas diartikan sebagai semua jaringan hubungan formal-informal sektor korporasi dan konsekuensinya bagi masyarakat umum. Secara umum konsep ini terkait dengan paradigma baru *civil society*.

Pada **KEP-117/M-MBU/2002 pasal 3** ditetapkan prinsip-prinsip *A Good Corporate Governance* yang meliputi :

1. Transparansi

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian

Yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas

Yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Pertanggungjawaban

Yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran

Yaitu keadaan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) seperti yang dikutip oleh majalah Manajemen Manusia edisi Juli 2000, *A Good Corporate Governance* adalah suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dijalankan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti direksi, dewan komisaris, manajer, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan, serta mengeluarkan peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan.

Menurut **David Melvill**, presiden *Chartered Institute of Management Accountant*, ada beberapa keuntungan dari penetapan *A Good Corporate Governance*, antara lain : mengurangi resiko, membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan dalam upaya *go public*, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan akuntabilitas sosial yang akan terungkap secara jelas. Ide pelaksanaan *A Good Corporate Governance* di Indonesia merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada perusahaan. Dengan *A Good Corporate Governance* diharapkan perusahaan dan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah praktik yang sehat di segala bidang .

Indonesia merupakan negara keempat yang melaksanakan *A Good Corporate Governance* di Asia setelah Malaysia, Hongkong, Korea Selatan. (Seperti dimuat media akuntansi, 2000).

Perwujudan *A Good Corporate Governance* ternyata sangat membutuhkan peran akuntan perusahaan, salah satunya adalah yang bekerja sebagai Auditor Internal. Dimana auditor internal yang meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi, disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan.

Perwujudan *A Good Corporate Governance* yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan pengendalian perusahaan sehingga dapat ditekan seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan.

Bagan 2.2

Bagan Kerangka Pemikiran



2.3 Pengembangan Hipotesis

Arikunto (2002:64) memberikan pengertian mengenai hipotesis yaitu :

“ Suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul”.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu bila audit internal dilaksanakan dengan memadai, maka akan berpengaruh terhadap perwujudan suatu *A Good Corporate Governance*.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah pada PT. KAI (Persero) Bandung, yaitu sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan no. 1 Bandung. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis pengaruh Audit Internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* (GCG). Sehingga objek penelitian pada skripsi ini adalah *internal audit group* perusahaan di dalam melaksanakan tugas atau fungsinya dan perwujudan GCG, yang diwakili oleh standar profesional audit internal dan penilaian terhadap *corporate governance*.

3.1.1 Sejarah Singkat PT. KAI (PERSERO) Bandung

Kehadiran Kereta Api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA didesa Kemijen jumat tanggal 17 juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr.L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlouze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij” (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir.J.P.De Bordes dari Kemijen menuju desa tanggung (26km) dengan lebar sepur 1.435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari sabtu, 10 agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen-Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang – Surakarta (110 km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 – 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km.

Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 km antara Makasar – Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang – Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak – Sambas (220km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di daerah itu.

Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm ; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tramkota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 – 1943)

sepanjang 473 km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah – Cikara dan 220 km antara Muaro – Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang memperkerjakan 27.500 orang, 25.000 di antaranya adalah romusha. Jalan yang melintas rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro – Pekanbaru.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam “Angkatan Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 september 1945 kekuasaan perkeretaapian berada ditangan bangsa Indonesia. Orang jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 september 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).

Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia

PERIODE	STATUS	DASAR HUKUM
1864	Pertama kali di bangun jalan Rel sepanjang 26 km antara kemijen – Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda.	
1864 - 1945	Staat Spoorwegeb (SS) Verenigde Spoorwegenbedrijf (VS) Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM).	IBW

1945 - 1950	DKA	IBW
1950 - 1963	DKA - RI	IBW
1963 - 1971	PNKA	PP.No.22 tahun 1963
1971 - 1991	PJKA	PP.No.61 tahun 1971
1991 - 1998	PERUMKA	PP.No.57 tahun 1990
1998 -	PT. KERETA API (PERSERO)	PP.No.19 tahun 1998 Kepres No.39 tahun 1999 Akte Notaris Imas Fatimah No. 2 tahun 1999

3.1.2 Aktivitas Usaha PT KAI (PERSERO) Bandung

Dalam menjalankan aktivitas usahanya PT PINDAD (Persero) khususnya manajemen mempunyai Visi, Misi dan Tujuan sebagai Berikut :

1. Visi Perusahaan adalah Terwujudnya Kereta Api sebagai pilihan utama jasa transportasi dengan fokus keselamatan dan pelayanan.
2. Misi Perusahaan adalah Menyelenggarakan jasa transportasi sesuai keinginan stake holder dengan meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan yang semakin efisien.
3. Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah melaksanakan dan mendukung kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan

pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun internasional di bidang perkeretaapian, yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan KA, kegiatan perawatan dan perusahaan prasarana perkeretaapian, pengusaha bisnis properti secara profesional, serta perusahaan bisnis penunjang prasarana dan sarana KA secara efektif untuk kemanfaatan umum.

3.1.3 Struktur Organisasi PT. KAI (Persero) Bandung

1. EVP Internal Audit / Head of Internal Audit

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun program dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kegiatan manajemen pusat dan daerah di bidang keuangan, prasarana, sarana, SDM, umum dan khusus, serta saran perbaikannya dengan fokus pada penerapan *Risk Based Auditing* untuk memastikan bahwa seluruh risiko bisnis telah dikendalikan dan dikelola secara memadai dan sebagai Counterpart untuk Eksternal Audit dan Komite Audit.

Tanggung jawab dari EVP Internal Audit :

- a. Mengawasi manajemen, pengujian dan penilaian hasil laporan, serta pengusutan di bidang keuangan.

- b. Mengawasi manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan, serta pengusutan di bidang teknik pemeliharaan prasarana dan teknik sarana.
- c. Mengawasi manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan, serta pengusutan di bidang operasi dan pemasaran.
- d. Mengawasi manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan, serta pengusutan di bidang SDM dan administrasi pendidikan dan pelatihan.
- e. Mengawasi manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan, serta pengusutan di bidang pengembangan usaha.
- f. Mengawasi manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan, serta pengusutan di bidang perencanaan jangka panjang, penelitian, teknologi informasi dan sistem informasi.
- g. Mengawasi manajemen, pengujian dan penilaian atas hasil laporan, serta pengusutan di bidang logistik.
- h. Mengawasi pengelolaan di bidang SDM dan pemeriksaan atas adanya laporan penyimpangan manajemen bidang SDM, khusus, tata usaha, data dan laporan, serta evaluasi program dan laporan hasil pemeriksaan.
- i. Melakukan inventarisasi dan kompilasi seluruh data laporan serta menyusun laporan hasil pemeriksaan kepada President Director.
- j. Melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

- k. Melaksanakan administrasi SDM dan penatausahaan di SPI, pembuatan konsep Surat Perintah Tugas, penyiapan Surat Perjalanan Dinas dan pertanggungjawaban uang muka dinas/jurnal.

2. VP. General Audit I dan II

Tugasnya :

- a. Memeriksa, menguji dan menilai pengelolaan bidang prasarana, sarana, operasi, pemasaran dan administrasi.
- b. Mengusut penyimpangan pengelolaan bidang prasarana, sarana, operasi, pemasaran dan administrasi.
- c. Memberi saran perbaikan dan pencegahan penyimpangan atas hasil pemeriksaan.

3. VP. Investigative Audit

Tugasnya :

- a. Memeriksa dan pengujian terhadap hal-hal yang bersifat khusus (Insidentil).
- b. Mengusut adanya laporan atas penyimpangan bidang yang bersifat khusus (Insidentil).
- c. Memberi saran perbaikan dan pencegahan penyimpangan atas hasil pemeriksaan.

4. VP. Control, Evaluation and Administration.

Tugasnya :

- a. Melaksanakan penyusunan program pengawasan tahunan dan evaluasi laporan hasil pemeriksaan.

- b. Melaksanakan administrasi SDM dan penatausahaan di SPI, pembuatan konsep Surat Perintah Pelaksanaan Tugas, penyiapan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawaban uang muka dinas/jurnal.

5. Senior Auditor

Tugasnya :

- a. Menghimpun, menggali dan memahami data/ ketetapan mengenai dan pemeriksaan yang bersifat khusus (insidental).
- b. Menghimpun, menggali dan memahami peraturan, prosedur (tata laksana) dan ketentuan lain yang berlaku yang bersifat khusus (insidental).
- c. Menyusun program kerja pemeriksaan.
- d. Melaksanakan pengawasan melekat, ketertiban pelaksanaan tugas dan pedoman dalam bidang khusus (insidental).
- e. Melaksanakan pengujian dan penilaian dari setiap unsur dalam bidang khusus (insidental).
- f. Melaksanakan pengusutan terhadap pengaduan dari masyarakat dan internal perusahaan tentang penyalahgunaan yang bersifat teknis operasional dan administratif yang terjadi di setiap unsur dalam bidang khusus (insidental).
- g. Menyusun saran tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, pengujian, penilaian, dan pengusutan.

- h. Memberikan saran perbaikan dan pencegahan penyimpangan yang terjadi.
- i. Memantau pelaksanaan saran perbaikan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada poin h.
- j. Mengevaluasi hasil pengujian, pemeriksaan dan penilaian laporan dan pengusutan.
- k. Membuat catatan/ statistik dan laporan hasil kerja.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif asosiatif dengan bentuk penelitian survey, yaitu metode yang melihat dan menggambarkan keadaan perusahaan secara sistematis, aktual dan akurat. Dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang nampak dalam perusahaan sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas objek yang diteliti agar dapat diambil suatu kesimpulan. Untuk menunjang metode deskriptif tersebut, penulis menggunakan data historis yaitu berupa data perusahaan pada masa lalu yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan data perusahaan sekarang yang diperoleh penulis.

3.2.1 Penentuan Responden

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey, yaitu penelitian yang hanya dilakukan pada suatu objek saja. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Oleh karena itu responden yang berkaitan

dengan penelitian ini adalah individu yang berkaitan dengan peranan audit internal dalam mewujudkan *GCG*. Individu-individu yang terlibat dalam perusahaan yaitu grup audit internal perusahaan.

3.2.2 Populasi, Sampel dan Responden

Menurut **Sugiyono (2004:55)**, pengertian populasi adalah sebagai berikut :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu”.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan sampel menurut **Sugiyono (2004:56)** adalah sebagai berikut:

“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel merupakan sebagian jumlah yang dimiliki oleh populasi. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili).

Sugiyono (2004:61) menyatakan bahwa :

“Sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel

jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel”.

Mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data, dan andaikata tidak seluruh responden mengembalikan kuesioner hingga batas akhir waktu, maka berdasarkan kondisi ini tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi tersebut. Dengan demikian, seluruh responden yang mengembalikan kuesioner dianggap sebagian sampel dari populasi yang diteliti. Adapun sifat acak atau random dari para responden diasumsikan telah terwakili melalui sifat acak dari pengembalian kuesioner.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi untuk obyek penelitian mengenai pengaruh audit internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance*. Populasi dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada banyaknya jumlah pegawai yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Populasi dan Sampel untuk Variabel X (Internal Audit)

No.	Jabatan Pegawai	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Kepala SPI	1
2.	Senior Auditor	5
3.	Administrasi SPI	1
4.	Auditor	13
TOTAL		18

Berdasarkan data tersebut diatas, maka diketahui bahwa penentuan jumlah sampel yang populasinya kurang dari 30 orang menggunakan sampling jenuh.

Menurut **Sugiyono** (2004;78) sampling jenuh adalah sebagai berikut :

“Sampling jenuh adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus, dimana anggota populasi dijadikan sampel”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sensus semua anggota populasi dapat dijadikan sampel, karena populasi ini adalah populasi yang relatif kecil yang berukuran kurang dari 30 orang yaitu 18 orang. Dengan demikian maka sampel sama dengan ukuran populasi atau sering disebut dengan sensus sebanyak 18 orang, maka penulis mengambil responden untuk variabel X (audit internal) sebanyak 18 responden (dari keseluruhan populasi), demikian juga untuk variabel Y (*good corporate governance*) sebanyak 18 responden yang berasal dari keseluruhan populasi yang dianggap sampel.

3.2.3 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, yaitu pengaruh audit internal terhadap perwujudan *a good corporate governance*, terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Adapun indikator yang digunakan mengacu pada teori yang telah dikemukakan dalam bab II. Kedua variabel tersebut :

- 1) Variabel Independen

Audit Internal sebagai variabel independen (X), yaitu suatu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sebaliknya variabel ini akan mempengaruhi variabel lainnya.

Variabel independen ini diturunkan kedalam lima indikator yaitu independensi, kemampuan profesional, lingkup kerja, pelaksanaan kegiatan audit, manajemen bagian Audit Internal.

2) Variabel Dependen

Perwujudan *a good corporate governance* sebagai variabel dependen (Y), yaitu variabel yang keberadaannya merupakan sesuatu yang dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel independen.

Variabel dependen ini diturunkan kedalam lima indikator yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Variabel-variabel beserta indikatornya, skala pengukuran, dan instrumen yang digunakan diikhtisarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Variabel, Indikator Variabel, Skala Pengukuran dan Instrumen yang
Digunakan

Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran	Alat Uji
X : Audit Internal Yang Memadai	1. Independensi Auditor Internal	Ordinal	Kuesioner
	2. Kemampuan Profesional Auditor Internal		
	3. Ruang Lingkup Audit Internal	Ordinal	Kuesioner
	4. Manajemen Bagian Audit Internal	Ordinal	Kuesioner
	5. Program Audit Internal	Ordinal	Kuesioner
	6. Pelaksanaan Audit Internal	Ordinal	Kuesioner
	7. Laporan Hasil Audit Internal	Ordinal	Kuesioner
	8. Tindak Lanjut atas Hasil Laporan Audit Internal	Ordinal	Kuesioner
		Ordinal	Kuesioner
Y : Perwujudan <i>A Good Corporate Governance</i>	1. Transparansi	Ordinal	Kuesioner
	2. Kemandirian	Ordinal	Kuesioner
	3. Akuntabilitas	Ordinal	Kuesioner
	4. Pertanggungjawaban	Ordinal	Kuesioner
	5. Kewajaran	Ordinal	Kuesioner

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka masing-masing variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan.

Setiap pertanyaan diberi nilai dengan menggunakan sistem skor guna untuk menentukan bobot penilaian. Pemberian skor dengan menggunakan 5 kategori jawaban sebagai berikut :

- a. Kategori sangat setuju, diberi skor 5
- b. Kategori setuju, diberi skor 4
- c. Kategori ragu-ragu, diberi skor 3
- d. Kategori tidak setuju, diberi skor 2
- e. Kategori sangat tidak setuju, diberi skor 1

Penilaian tersebut didasarkan pada model yang umum digunakan yaitu Skala Likert, yang dilakukan dengan cara menetapkan bobot, dan kemudian ditambahkan untuk mendapatkan suatu jumlah dari masing-masing indikator yang hendak diukur.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data teoritis sebagai data pemecahan masalah dalam pembahasan. Data diambil dari buku pegangan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

2. Riset Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian pada perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh data primer dan penelitian ini dilaksanakan dengan cara pengumpulan data melalui :

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pelaksanaan audit internal khususnya yang berkaitan dengan audit internal mengenai *a good corporate governance*.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara mengadakan tanya-jawab dengan pihak-pihak terkait dengan proses audit internal dan perwujudan *a good corporate governance*.
- c. Kuesioner, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian hasilnya diuji dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan positif antara audit internal dengan perwujudan *a good corporate governance*. Tentu saja audit internal ini hanya merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan perwujudan *a good corporate governance*.

Setelah data dikumpulkan, lalu mengolahnya dan menganalisisnya, karena dengan data analisis inilah, data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam mengolah data mentah ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan coding

Pemberian kode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti pada saat melakukan analisis. Pemberian kode terhadap jawaban artinya menaruh angka pada tiap jawaban. Dalam hal ini, kode yang diberikan pada setiap jawaban responden sama dengan bobot nilai dan jenis jawaban responden adalah jawaban dari hasil pertanyaan yang sifatnya tertutup dan memberikan alternatif jawaban yang bersifat ordinal artinya terdapat gradasi, urutan, dan jenjang. Tabel 3.2 dibawah ini menyajikan pemberian kode untuk jawaban pertanyaan tertutup, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pemberian Kode untuk Jawaban Pertanyaan Tertutup

Jawaban	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (R)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Membuat tabulasi

Membuat tabulasi artinya memasukan data kedalam tabel-tabel, dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tabel frekuensi, sehingga dapat diketahui jumlah responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu.

3. Menganalisis data

Analisis data merupakan serangkaian proses dalam rangka pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meringkas data sehingga mudah dibaca dan memberikan arti pada data tersebut.

3.2.6 Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.6.1 Metode Analisis

1. Analisa Regresi Linear Sederhana

Analisa regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besar tidaknya pengaruh variabel audit internal (X) terhadap variabel perwujudan *A Good Corporate Governance* (Y). Menurut Husein Umar (1999:126) persamaan regresi linear sederhana, dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

X = Audit Internal

Y = Perwujudan *A Good Corporate Governance*

a = Konstanta Regresi

b = Koefisien Regresi

n = Banyaknya data

Untuk mencari nilai a dan b dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{a} = \frac{\sum y \cdot (\sum x^2) - \sum x \cdot \sum xy}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \qquad \mathbf{b} = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

2. Analisa Koefisien Korelasi

Analisa koefisien korelasi digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan sebagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara variabel X (Audit Internal) dengan variabel Y (Perwujudan *A Good Corporate Governance*). Menurut Singgih Santoso (2004:315), korelasi Rank Pearson adalah :

“Koefisien ini lebih mengukur keeratan antara hasil-hasil pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varians (*bivariate*)”.

Rumus dari Korelasi Pearson adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{r} = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

r : Koefisien Korelasi Pearson

ΣX : Variabel Bebas (Independen)

ΣY : Variabel Terikat (Dependen)

n : Jumlah tahun yang dihitung

ΣXY : Jumlah hasil perkalian

Nilai Koefisien korelasi terletak antara -1 dan +1, atau $-1 \leq r \leq +1$

1. Jika nilai $r = 1$ menunjukkan hubungan linier positif sempurna antara X dan Y, dalam arti makin besar variabel X makin besar pula variabel Y, atau makin kecil variabel X maka makin kecil pula variabel Y.
2. Jika nilai $r = -1$ menunjukkan hubungan linier negatif sempurna antara X dan Y, dalam arti makin besar variabel X makin kecil variabel Y, atau makin kecil variabel X makin besar pula variabel Y.
3. Jika nilai $r = 0$ menunjukkan tidak ada hubungan linier antara X dan Y.

Untuk mengetahui keeratan atau derajat asosiasi hubungan antara Variabel X dan Variabel Y, maka dapat digunakan **Kriteria Guilford**. Hubungan akan terperinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Guilford
Variabel X dan Variabel Y

Nilai Korelasi	Interpretasi
0.00-0.20	Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan
0.20-0.40	Hubungan yang sangat kecil (tidak erat)
0.40-0.70	Hubungan yang cukup
0.70-0.90	Hubungan yang erat
0.90-1.00	Hubungan yang sangat erat

3.2.6.2 Rancangan Pengujian Hipotesis

Untuk meyakinkan bahwa Hipotesa yang dirumuskan adalah benar, diperlukan pengujian terhadap Hipotesis pada penelitian ini yang disusun dalam beberapa tahap, meliputi :

1. Penetapan Hipotesis

Hipotesis Penelitian : Audit Internal berpengaruh terhadap Perwujudan *A Good Corporate Governance*

Hipotesis Statistiknya:

$H_0 : \rho=0$, berarti tidak terdapat pengaruh antara Audit Internal

terhadap Perwujudan *A Good Corporate Governance*

$H_0 : \rho \neq 0$, berarti terdapat pengaruh antara Audit Internal terhadap Perwujudan *A Good Corporate Governance*

2. Penetapan Tingkat Signifikansi

Dalam Penelitian ini Penulis akan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) karena dinilai cukup erat untuk mewakili hubungan antara kedua variabel tersebut dan sekaligus merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian, ilmu-ilmu sosial Artinya jika H_0 benar, maka probabilitas melakukan kesalahan menolak hipotesis adalah sebesar 0,05.

3. Koefisien Determinasi

Melihat keeratan hubungan antara variabel X dengan Y kurang baik kalau dilihat dari r , karena r hanya menyatakan erat atau tidak erat. Interpretasi yang lebih lengkap adalah melalui koefisien determinasi.

Koefisien Determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi yang menyatakan besarnya persentase perubahan Y yang bisa diterapkan oleh X melalui hubungan X dengan Y. Adapun rumus dari Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Kd = r^2 \times 100\%}$$

Dimana :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi Pearson

100% = Pengali yang menyatakan dalam persentase

3.2.7 Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, juga didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Maka akan terdapat dasar untuk penarikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis selanjutnya akan mencoba memberikan pandangan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi maupun peneliti selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Audit Internal dalam Mewujudkan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. KAI (PERSERO) diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

4.1.1 Unit Audit Internal

4.1.1.1 Maksud dan Tujuan

Unit Internal Audit dibentuk sebagai kelengkapan perangkat di dalam organisasi Perusahaan untuk memberikan bantuan kepada *Board of Directors (BOD)/ BOC/ Unit Bisnis* berupa analisis, penilaian, rekomendasi, konsultan dan informasi mengenai aktivitas perusahaan dan untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan Unit Internal Audit adalah untuk membantu BOD dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Keandalan dan integritas informasi
- b. Kesesuaian dengan neraca, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Perlindungan harta kekayaan perusahaan dan kepentingan perusahaan.
- d. Penggunaan sumber-sumber secara ekonomis dan efisien.
- e. Pencapaian program-program perusahaan secara efektif.

4.1.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggungjawab internal audit dalam membantu BOD/Pimpinan Unit Bisnis melaksanakan fungsi pengelolaan khususnya untuk mendorong agar perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Pelaporan Keuangan

Melaksanakan audit atas pelaporan keuangan untuk memberikan keyakinan atas kelayakan, ketepatan waktu, dan relevansi pelaporan keuangan.

b. Kepatuhan terhadap SOA (*Sarbanes Oxley Act*)

1. Mengefektifkan penyelenggaraan internal audit dengan pendekatan risk based audit untuk memastikan bahwa SOA telah diimplementasikan secara efektif.
2. Melakukan *asement* atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal berkenaan dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan.
3. Melaksanakan *asement* atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
4. Memonitor dan mendorong Unit Bisnis untuk memperbaiki dan menyelesaikan temuan-temuan audit termasuk temuan dari auditor eksternal.
5. Memastikan mekanisme *Control Self Assement (CSA)* dalam pengelolaan Internal Control dilaksanakan secara konsisten oleh BOD/ Unit Bisnis.

6. Melaksanakan evaluasi terhadap sertifikasi CEO dan CFO mengenai laporan keuangan dan sertifikasi CEO dan CFO mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, untuk memberikan keyakinan bahwa sertifikasi-sertifikasi tersebut masing-masing telah sesuai dengan ketentuan SOA.

c. Penerapan GCG

Memastikan bahwa BOD telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam penyelenggaraan perusahaan dan memastikan bahwa pengelolaan juga dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keekonomisan, keefektifan, dan efisiensi dalam pencapaian tujuan perusahaan.

d. Manajemen Risiko

1. Memastikan bahwa risiko bisnis pada seluruh aktivitas bisnis telah dikelola secara memadai dengan sistem internal control yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Memberikan opini yang independen kepada BOD, Komite Risiko dan Unit Risk Management terhadap efektifitas penanganan risiko dan mendukung dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi proses manajemen risiko perusahaan.

3. Memberikan bantuan terhadap perusahaan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan serta memberikan kontribusi untuk meningkatkan manajemen risiko dan sistem pengendalian yang terkait dengan tata kelola organisasi, operasi dan sistem informasi mengenai:

- Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional

- Efektifitas dan efisiensi operasi.
- Pengamanan asset.
- Ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kontrak.

e. Sistem Informasi

Melakukan evaluasi efektifitas rancangan dan pelaksanaan atas sistem informasi baik dalam tingkat transaksional maupun tingkat entitas.

f. Melaksanakan audit khusus berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan apabila diperlukan.

g. Tugas khusus :

- Menjadi *counterpart* untuk eksternal audit dan komite audit.
- Memonitor pelaksanaan tindak lanjut dari hasil penugasan.
- Melaksanakan tugas khusus lainnya dari Direktur Utama atau komite audit, termasuk yang berhubungan dengan kecurangan, pengaduan.

h. Membuat laporan hasil *Assement* atau hasil pelaksanaan tugas audit internal lainnya yang berisi informasi antara lain :

- Data/Fakta yang ditemukan dilapangan.
- Pendapat atau kesimpulan mengenai derajat kesesuaian antara kenyataan dilapangan dengan standar, ketentuan perundangan-undangan/ kebijakan/ peraturan/ prosedur proses yang berlaku.
- Rekomendasi kepada BOD/ Unit Bisnis tentang :

- a. Peran/ dukungan manajemen untuk mencegah terulangnya penyimpangan yang ditemukan.

- b. Efektifitas efisiensi dan keekonomisan atas kebijakan/ prosedur/ peraturan.
- c. Ketersediaan kebijakan peraturan/ prosedur/ proses untuk pedoman operasional bagi Unit Bisnis.

4.1.1.3 Wewenang

- a. Internal Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas, semua catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan yang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Internal Audit dapat memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan sistem otorisasi yang berlaku dalam perusahaan serta apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Direktur Utama, Internal Audit dapat memperkerjakan tenaga ahli atau konsultan.

4.1.1.4 Pertanggungjawaban

- a. Internal audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud butir a ayat ini meliputi antara lain :
 - 1. Laporan hasil setiap pelaksanaan tugas.
 - 2. Laporan triwulan mengenai pelaksanaan tugas
 - 3. Laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas

4. Laporan evaluasi mandiri kinerja internal audit.
- c. Laporan harus mencerminkan atau mengandung antara lain :
1. kelengkapan dan keutuhan kebijakan audit.
 2. efektifitas penyelenggaraan internal audit yang dilaksanakan dengan mengimplementasikan prasyarat SOA serta dikelola dengan pendekatan risk based audit.
 3. ketepatan, akurasi, kewajaran dan rekomendasi laporan hasil audit yang diberikan kepada BOD/ Pimpinan Unit Bisnis untuk peningkatan performance perusahaan.
 4. kepastian bahwa risiko bisnis pada seluruh aktivitas bisnis telah dikelola secara memadai dengan sistem *internal control* yang dilaksanakan secara efektif dan konsisten.
 5. Mekanisme CSA dalam pengelolaan *Internal Control* dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing BOD/ Unit Bisnis.

4.1.2 Pedoman Pelaksanaan Tugas Staf Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas Audit, staf atau pelaksana Audit Internal diwajibkan untuk melaksanakan langkah-langkah audit sebagai berikut :

4.1.2.1 Perencanaan Pelaksanaan Audit

Suatu audit memerlukan perencanaan yang mendalam namun harus bersifat fleksibel, secara umum proses perencanaan audit sejalan dengan anggaran yang tersedia. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan

yaitu :

- Perencanaan bersifat luwes/ fleksibel sehingga dimungkinkan penanggung jawab, pengawas tim, Ketua Tim Audit mengarahkan penekanan audit pada temuan baru yang penting.\
- Hasil audit yang lalu akan mempengaruhi program kerja yang akan disusun.
- Jenis dan luasnya pekerjaan yang dilakukan.
- Tenaga, dana, dan sarana yang digunakan.
- Anggaran dan waktu yang di audit
- Bentuk dan isi laporan yang dibuat.

4.1.2.2 Persiapan Audit

Kegiatan audit dapat dilaksanakan dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama, Maka perlu dilakukan persiapan yang terdiri dari

- a. Menyusun rencana pelaksanaan audit yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. Dasar audit.
 2. Tujuan Audit
 3. Ruang lingkup audit.
 4. Lokasi dan objek yang diaudit.
 5. Periode audit.
 6. Jadwal pelaksanaan audit.
 7. Metode audit.

8. Langkah-langkah pelaksanaan audit.

9. Susunan organisasi tim Audit.

b. Penerbitan Surat Perintah Kerja

c. Membuat kuesioner Pengendalian intern

Kuesioner pengendalian Intern dibuat untuk mengumpulkan informasi dari *auditee* dalam rangka menilai aspek pengendalian intern yang dilakukan oleh obyek audit. Kuesioner Pengendalian Intern dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada *auditee* untuk dijawab dan dikembalikan kepada auditor pada waktunya.

d. Pemberitahuan kepada Pimpinan *Auditee*

Nota Dinas pemberitahuan dari Kepala Audit Internal kepada pimpinan *auditee* mengenai rencana pelaksanaan audit yang memuat dasar, tujuan, ruang lingkup, lokasi dan obyek, serta jadwal serta susunan organisasi tim audit.

e. Pembicaraan Pendahuluan dengan pimpinan obyek yang diaudit

Pembicaraan pendahuluan supaya dipersiapkan dengan seksama dan dilakukan oleh pejabat/ petugas auditor internal dengan memperhatikan tingkat pejabat/ pimpinan obyek yang di audit.

f. Pengumpulan informasi umum tentang obyek yang diaudit

Auditor harus mendapatkan informasi secara garis besar sedini mungkin sebagai bahan penyusunan audit program pendahuluan, informasi latar belakang mengenai obyek yang diaudit bagi para auditor yang dimasukkan

dalam data arsip permanen, dan analisis terhadap bagian yang penting tentang obyek yang akan di audit.

g. Penyusunan Ikhtisar hasil persiapan audit

Untuk memudahkan penyusunan program audit pendahuluan selanjutnya hasil persiapan audit perlu di tuangkan kedalam suatu ikhtisar yang memuat pokok-pokok informasi yang di peroleh.

4.1.2.3 Audit Pendahuluan

Pada tahap ini audit bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek manajemen yang menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang masih mungkin ditingkatkan lebih efisien dalam mencapai tujuannya secara efektif, dan juga mengidentifikasi praktek manajemen yang sangat baik sehingga dapat dipakai sebagai teladan bagi pihak lain. Hasil dari tahap Audit Pendahuluan digunakan sebagai dasar penyusunan program Audit lanjutan.

4.1.2.4 Pelaksanaan Audit Lanjutan

Tahap ini adalah audit atau penilaian lebih lanjut atas kegiatan Audit Pendahuluan sejauh diperlukan guna mencapai tujuan audit. Kegiatan dalam tahap ini meliputi pedalaman dan pengembangan semua informasi penting dan relevan yang berguna untuk mempertimbangkan, mendukung temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan dan mengajukan rekomendasi.

4.1.2.5 Konfirmasi dan Klarifikasi

Untuk mendapatkan keyakinan bahwa temuan dan permasalahan yang dituangkan dalam matriks narasi tersebut adalah benar, terarah dan terkendali serta guna mendapatkan pertimbangan yang lebih matang untuk menyakini bahwa *auditee* akan menindaklanjuti rekomendasi dari auditor.

4.1.2.6 Menyusun Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi auditor untuk menyampaikan informasi hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang atau yang perlu mengetahui informasi tersebut. Tujuan laporan dari setiap penugasan audit harus ditetapkan dengan jelas sejak awal dan bahan-bahan laporan harus disusun segera setelah diperoleh informasi yang diperlukan.

4.1.2.7 Publikasi dan Dokumentasi

- a. Publikasi adalah suatu informasi yang berbentuk laporan dari unit audit internal kepada yang membutuhkan.
- b. Dokumentasi audit merupakan sekumpulan dokumen dan kertas kerja audit yang tidak terpisahkan dari hasil pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut hasil audit, dimana data dan informasi yang terekam didalamnya merupakan wujud dari tanggungjawab pelaksanaan audit.

4.1.2.8 *Monitoring* Tindak Lanjut

Pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil audit merupakan proses untuk memonitor pelaksanaan rekomendasi dari hasil audit yang telah dilaksanakan. Unit audit internal berkewajiban memantau dan melaporkan tindak lanjut hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama dengan tujuan untuk memastikan bahwa *auditee* telah melaksanakan rekomendasi dan untuk mengetahui apakah ada kesulitan dalam menjalankan rekomendasi tersebut. Untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut, Laporan hasil audit dituangkan kedalam matrik temuan.

Saat ini Audit Internal telah menetapkan system aplikasi komputer untuk mengelola temuan yang akan dimonitor. Temuan-temuan yang terdapat dalam laporan hasil audit diinputkan kedalam database temuan dengan menggunakan aplikasi *monitoring* tindak lanjut tersebut. Tujuan dari *Monitoring* tindak lanjut hasil audit :

1. Untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan rekomendasi hasil audit pada suatu lokasi dan periode waktu tertentu sesuai dengan matriks temuan yang telah disepakati dalam proses pembahasan dan konfirmasi temuan dengan *auditee*.
2. Untuk menyakini tindak lanjut temuan dapat dilaksanakan atau tidak.
3. Untuk memfasilitasi *auditee* dalam melaksanakan tindak lanjut apabila terdapat hambatan.

4.1.3 Pelaksanaan Audit Internal yang terkait dengan *Good Corporate Governance*

Satu hal langkah audit yang sangat penting dalam aktivitas perwujudan *A Good Corporate Governance* PT. KAI (Persero) Bandung adalah audit atas bukti perwujudan *A Good Corporate Governance*. Pada setiap tahap pelaksanaan Audit Internal atas aktivitas perwujudan *A Good Corporate Governance* khususnya, telah dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu dan terdapat fungsi pengawasan.

Perencanaan Audit Internal yang didokumentasikan sudah meliputi : tujuan dan lingkup pekerjaan, informasi dasar, tenaga yang diperlukan, pemberitahuan pada pihak terkait, survei secara tepat, penulisan program audit, penentuan (bagaimana, kapan, dan kepada siapa) hasil audit disampaikan, serta persetujuan rencana kerja audit.

Pelaksanaan audit berdasarkan pada program audit yang telah disusun sebelumnya. Program Audit Internal dilakukan secara periodik dan terencana karena sangat penting dalam hal mendukung kinerja perusahaan. Dalam pelaksanaan audit, dilakukan evaluasi terhadap resiko yang berkaitan dengan sistem informasi, efektivitas dan efisiensi operasi, kesesuaian hukum dan perundang-undangan, serta keamanan aset. Selama auditor internal mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit, telah mendapat pengawasan yang memadai.

Laporan hasil audit yang disajikan cukup relevan digunakan untuk menarik perhatian perusahaan ke arah bidang yang terjadi penyimpangan. Setiap laporan hasil audit menyajikan temuan-temuan dan rekomendasi yang diperlukan. Laporan hasil audit cukup akurat, objektif, dan tepat waktu untuk menunjang perwujudan *A Good Corporate Governance*.

Auditor secara terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pelaksanaan GCG di PT. KAI (PERSERO)

Kegiatan GCG di perusahaan telah dilakukan sejak tahun 2002, dengan mulai mengikuti seminar nasional untuk tingkat direksi sampai pada fungsi terkait. Pada tanggal 1 Agustus 2002 melalui Surat Perintah Direksi Nomor : KEP.U/HK.215/VIII/KA-2002 dibentuk Tim GCG yang diberi tugas :

1. Menyiapkan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan *assessment* GCG;
2. Menyiapkan kerangka dasar untuk penerapan GCG secara berkelanjutan;
3. Sebagai counter part dari Tim Assessor sesuai bidang dan tingkatannya;
4. Melaporkan kegiatan Tim secara periodik kepada Dirrenbang (sebagai pengarah teknis) sampai proses *assessment* selesai.

Assessment penerapan GCG di perusahaan, pertama kali dilakukan oleh assessor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan counter part Tim GCG perusahaan. *Assessment* dilakukan selama 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 7 September sampai dengan 3 Desember 2004.

Pada tanggal 27 Desember 2005 sampai dengan 8 Maret 2006 dilakukan review tindak lanjut penerapan GCG untuk tahun 2005 berdasarkan *assessment* tahun 2004, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan counter part Tim GCG perusahaan.

Review dilakukan dengan pengujian terhadap pengupayaan aspek perbaikan sebagai berikut :

1. Penanganan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan *assessment*.
2. *Progress* tindak lanjut hasil pelaksanaan *assessment*.
3. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengakumulasi kepentingan seluruh *stakeholder* terkait dengan penyelenggaraan prinsip *A Good Corporate Governance*.
4. Keberadaan, fungsi serta tugas dari organ utama dan organ pendukung.
5. Pengelolaan hubungan dengan *stakeholder* lainnya.

Guna *assessment* penerapan GCG tahun 2006, perusahaan menetapkan untuk melakukan *assessment* secara mandiri yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direksi. Kegiatan self *assessment* oleh Tim dilaksanakan mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 30 April 2007.

4.1.8.1 Transparansi

Transparansi adalah bahwa setiap proses serta hasil-hasil pekerjaan yang dilaksanakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Aspek transparansi di dalam pengelolaan perusahaan di PT. KAI (Persero) dapat dilihat dari berbagai bidang. Dalam rangka transparansi kepada publik dan pemegang saham, perseroan memberikan keterbukaan (*disclosure*).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT. KAI (Persero) akan menyampaikan informasi untuk dilaporkan kepada Pemegang Saham sebagai berikut :

- Laporan Triwulan, terdiri dari Laporan realisasi Perolehan Kontrak, Penjualan, Produksi, Investasi, SDM, serta Kinerja Keuangan.
- Laporan Tahunan, terdiri dari Laporan realisasi Perolehan Kontrak, Penjualan, Produksi, Investasi, SDM, serta Kinerja Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang berisi rencana kerja dan anggaran sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN nomor : SKEP-101/MBU/2002, dan diartikan dalam RUPS.
- Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RUPP), yang berisi rencana jangka panjang untuk 3 tahun ke depan, sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN nomor : SKEP-102/MBU/2002.

4.1.8.2 Kemandirian

Kemandirian (Independensi) adalah bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan secara profesional dengan mengesampingkan pengaruh atau tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Berkaitan dengan aspek kemandirian, Direksi dan Komisaris PT. KAI (Persero) dapat memberikan pendapat yang independen dalam setiap pengambilan keputusan.

4.1.8.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bahwa setiap pekerjaan dilakukan oleh pegawai sesuai fungsi dan kompetensi yang dimiliki secara optimal serta bertanggung jawab atas proses dan hasil pekerjaannya.

Untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4.1.8.4 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

PT. KAI (Persero) selalu mengutamakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Setiap pihak atau bagian memiliki tugas dan fungsi

masing-masing yang terpisah, alokasi tanggung jawab masing-masing secara jelas tercantum dalam kebijakan peraturan perusahaan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4.1.8.5 Kewajaran

Kewajaran adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) mendapatkan perlakuan yang setara (equal) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi aspek dalam penyampaian informasi, PT. KAI (Persero) memberikan informasi yang wajar kepada publik, dan pemegang saham. Hubungan dengan karyawan juga terus dijaga yaitu dengan menghindari praktek diskriminasi, antara lain menghormati hak asasi karyawan, memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, bangsa, agama dan gender, memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang berharga.

4.2 Pengujian Hipotesis

4.2.1 Analisis Statistik

4.2.1.1 Analisis Regresi Sederhana

Untuk mengukur besar tidaknya pengaruh variabel X (Audit Internal) terhadap variabel Y (Perwujudan *A Good Corporate Governance*), maka digunakanlah analisis regresi sederhana. Sehingga diketahui besarnya sebagai berikut:

$Y = a + bX$, dimana untuk mencari nilai a dan b dapat digunakan rumus

sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum y \cdot (\sum x^2) - \sum x \cdot \sum xy}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \qquad b = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

JUMLAH RESPONDEN	VARIABEL X	VARIABEL Y	X ²	Y ²	XY
1	198	90	39.204	8.100	17.820
2	183	77	33.489	5.929	14.091
3	178	75	31.684	5.625	13.350
4	202	84	40.804	7.056	16.968
5	175	77	30.625	5.929	13.475
6	172	75	29.584	5.625	12.900
7	172	80	29.584	6.400	13.760
8	207	82	42.849	6.724	16.974
9	207	84	42.849	7.056	17.388
10	181	75	32.761	5.625	13.575
11	195	82	38.025	6.724	15.990
12	207	84	42.849	7.056	17.388
13	192	80	36.864	6.400	15.360
14	189	82	35.721	6.724	15.498
15	194	80	37.636	6.400	15.520
16	176	77	30.976	5.929	13.552
17	188	81	35.344	6.561	15.228
18	190	83	36.100	6.889	15.770
19	184	81	33.856	6.561	14.904
n = 19	∑X = 3.590	∑Y = 1.529	∑X² = 680.804	∑Y² = 123.313	∑XY = 289.511

$$a = \frac{\sum y \cdot (\sum x^2) - \sum x \cdot \sum xy}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(1.529 \times 680.804) - (3.590 \times 289.511)}{(19 \times 680.804) - (3.590)^2}$$

$$a = \frac{1.040.949.316 - 1.039.344.490}{\dots}$$

$$12.935.276 - 12.888.100$$

$$\mathbf{a = 34}$$

$$\mathbf{b = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}}$$

$$\mathbf{b = \frac{(19 \times 289.511) - (3.590 \times 1.529)}{(19 \times 680.804) - (3.590)^2}}$$

$$\mathbf{b = \frac{5.500709 - 5.489.110}{12.935.276 - 12.888.100}}$$

$$\mathbf{b = \frac{11.599}{47.176}}$$

$$\mathbf{b = 0,24}$$

Maka berdasarkan rumus diatas, dapat diketahui nilai a dan b yaitu :

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

$$\mathbf{Y = 34 + 0,24X}$$

4.2.1.2 Analisis Korelasi Pearson

Untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan sebagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini, yaitu

hubungan antara variabel X (Audit Internal) dengan variabel Y (Perwujudan *A Good Corporate Governance*).

Rumus dari **Korelasi Pearson** adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r = \frac{(19 \times 289.511) - (3.590 \times 1.529)}{\sqrt{\{(19 \times 680.804) - (3.590)^2\} \{(19 \times 123.313) - (1.529)^2\}}}$$

$$r = \frac{5.500.709 - 5.489.100}{\sqrt{\{12.935.276 - 12.888.100\} \{12.342.947 - 2.337.841\}}}$$

$$r = \frac{11.599}{\sqrt{47.176 \times 5.106}}$$

$$r = \frac{11.599}{\sqrt{240.880.656}}$$

$$r = \frac{11.599}{\dots}$$

15.520,33041

$$\mathbf{r = 0,7473}$$

Maka berdasarkan perhitungan, diperoleh : $\mathbf{r = 0,7473}$

Nilai korelasi untuk Audit Internal hubungannya dengan Perwujudan *A Good Corporate Governance* adalah 0,7473 , maka hubungan ini menurut aturan kriteria Guilford termasuk hubungan yang erat (reliabel).

4.2.1.3 Analisis Koefisien Determinasi

Melihat keeratan hubungan antara variabel X dengan Y kurang baik apabila dilihat dari r, karena r hanya menyatakan erat atau tidak erat. Interpretasi yang lebih lengkap adalah melalui koefisien determinasi.

Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi yang menyatakan besarnya presentase perubahan Y yang bisa diterapkan oleh X melalui hubungan X dengan Y. Adapun rumus dari Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Kd = r^2 \times 100\%}$$

$$Kd = (0,7473)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,55845.729 \times 100\%$$

$$\mathbf{Kd = 55,84\%}$$

Maka berdasarkan perhitungan, diperoleh :

$$\mathbf{Kd = 55,84\%}$$

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat dikatakan bahwa Audit Internal (variabel X) cukup berpengaruh dalam mewujudkan *A Good Corporate*

Governance (variabel Y) sebesar 55,84% dan sisanya sebesar 44,16% dijelaskan oleh faktor lain.

4.2.2 Kesimpulan Uji Hipotesis

Berdasarkan pembahasan mengenai Audit Internal dan Perwujudan *A Good Corporate Governance* di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero) berpengaruh cukup kuat dengan terpenuhinya kriteria-kriteria yang dapat menciptakan audit internal yang memadai dan terwujudnya *a good corporate governance*.

Dari hasil pengolahan data pengujian hipotesis secara manual dapat diketahui bahwa besarnya $r = 0,7473$ maka hubungan ini menurut aturan kriteria Guilford termasuk hubungan yang erat (reliabel) dan besarnya pengaruh variabel X (Audit Internal) terhadap variabel Y (Perwujudan *A Good Corporate Governance*) adalah sebesar $Kd = 55,84\%$ dan sisanya 44,16% dijelaskan oleh faktor lain, yaitu Gaya kepemimpinan masih kurang baik, dan karyawan kurang berani dalam mengungkapkan ketidakberesan pada tubuh perusahaan yang diaudit kepada masyarakat dan tidak adanya komite audit. Berdasarkan perhitungan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

H_0 = Ditolak

H_1 = **Diterima, berarti Audit Internal mempunyai pengaruh yang positif terhadap Perwujudan *A Good Corporate Governance*.**

Jadi dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu “bila Audit Internal yang dilaksanakan dengan memadai, akan berpengaruh terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance*”, dapat diterima.

Hal ini didukung oleh adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Independensi auditor internal yang memadai
2. Kemampuan profesional / kompetensi auditor internal yang memadai
3. Ruang lingkup audit internal yang menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan yang ada
4. Manajemen bagian audit internal yang terorganisir dengan baik
5. Program audit internal yang jelas dan terarah
6. Laporan hasil audit internal yang akurat dan tepat waktu
7. Tindak lanjut atas hasil laporan audit internal untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Meskipun demikian terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Audit Internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Gaya kepemimpinan yang masih kurang baik.
2. Tidak adanya komite audit.
3. Karyawan kurang berani dalam mengungkapkan ketidakberesan pada tubuh perusahaan yang diaudit kepada masyarakat

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Audit Internal terhadap

Perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero)

Hasil pengujian hipotesis di atas, menghasilkan r sebesar 0,7473 yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan erat antara Audit Internal (variabel independen) dengan perwujudan *A Good Corporate Governance* (variabel dependen). Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan pengaruh Audit Internal yang memadai di dalam perusahaan akan menguatkan perwujudan *A Good Corporate Governance* di dalam perusahaan.

Berdasarkan perhitungan Koefisien Determinasi, yaitu perhitungan untuk mengukur pengaruh variabel X dalam mempengaruhi variabel Y yang dilakukan penulis, menghasilkan sebesar 55,84%. Sedangkan dalam perhitungan koefisien residu, yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh nyata faktor-faktor lainnya di luar variabel X yang ikut mempengaruhi variabel Y, didapat sebesar 44,16. Hal ini menggambarkan bahwa faktor lain di luar pengaruh Audit Internal, memiliki pengaruh sebesar 44,16% terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance*.

Di dalam penelitian ini, isu yang diangkat adalah pengaruh Audit Internal dan perwujudan *A Good Corporate Governance* dalam perusahaan.

Jadi berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dilihat persepsi responden yang positif atas pengaruh Audit Internal dan perwujudan *A Good Corporate Governance* di dalam perusahaan.

4.3.1 Pelaksanaan Audit Internal

Berdasarkan tanggapan dari responden dan pengamatan penulis, pelaksanaan audit internal PT. KAI (Persero) Bandung ialah independensi auditor internal yang memadai, kemampuan profesional / kompetensi auditor internal yang memadai, ruang lingkup audit internal yang menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan yang ada, manajemen bagian audit internal yang terorganisir dengan baik, program audit internal yang jelas dan terarah, laporan hasil audit internal yang akurat dan tepat waktu, serta tindak lanjut atas hasil laporan audit internal untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Adanya pengaruh Audit Internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* menunjukkan pentingnya pengaruh Audit Internal dalam rangka perwujudan *A Good Corporate Governance*.

4.3.2 Perwujudan *A Good Corporate Governance*

Berdasarkan tanggapan dari responden dan pengamatan penulis, Perwujudan *A Good Corporate Governance* PT. KAI (Persero) Bandung ialah akuntabilitas yang memadai, pertanggungjawaban terhadap peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, serta kewajaran dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*.

Salah satu elemen penting dalam *Corporate Governance* adalah tersedianya fungsi SPI (Satuan Pengawasan Intern) yang dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan mempunyai kemampuan yang cukup.

4.3.3 Pengaruh Audit Internal terhadap Perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero)

Bagi suatu perusahaan industri seperti PT. KAI (Persero), *A Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan serta mengakumulasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti auditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luar. Oleh karena itu dituntut untuk terus meningkatkan pelaksanaan *A Good Corporate Governance* guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta perkembangan perusahaan. Unsur-unsur Perwujudan *A Good Corporate Governance* adalah adanya transparansi, adanya kemandirian, adanya akuntabilitas, adanya pertanggungjawaban, dan adanya kewajaran.

Untuk membantu proses perwujudan *A Good Corporate Governance* tersebut, PT. KAI (Persero) telah melakukan pengendalian dan pengawasan. Sejalan dengan berkembangnya perusahaan, pimpinan tidak dapat secara langsung mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Untuk itu, pimpinan mendelegasikan tugas tersebut kepada bagian SPI (Satuan Pengawasan Intern).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Audit Internal telah berpengaruh cukup erat terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero). Hal ini didukung oleh adanya audit internal yang memenuhi kualifikasi yaitu independensi, kompetensi/kemampuan profesional yang memadai yang ditunjang oleh adanya pelatihan-pelatihan di bidang audit internal, serta adanya ruang

lingkup, manajemen bagian audit internal, program audit internal, pelaksanaan audit internal, laporan hasil audit internal, dan tindak lanjut atas hasil laporan audit internal yang memadai sehingga mempengaruhi perwujudan *A Good Corporate Governance*.

Audit internal yang memadai tersebut tentu saja memberikan dampak yang positif terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance*. Dengan adanya audit tersebut, proses perwujudan *A Good Corporate Governance* terawasi dengan baik dan maksimal seperti yang dialami oleh PT. KAI (Persero) yaitu :

1. Terjalinnnya Mekanisme hubungan kerja yang baik antara Auditor Internal dengan Auditor Eksternal, maka peran yang dijalankan oleh Auditor Internal akan dapat mendukung transparansi yang ada di perusahaan.
2. Akuntabilitas yang memadai, ini terlihat dari adanya evaluasi secara berkala atas pengendalian internal perusahaan sehingga mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif.
3. Pertanggungjawaban terhadap peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
4. Kewajaran dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*.
5. Penerapan prinsip kemandirian dapat dilihat dari Posisi Audit Internal yang bebas dari pengaruh dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan laporan hasil audit yang obyektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap Perwujudan *A Good Corporate Governance*. Hal ini didukung oleh adanya hasil pengujian secara metode deskriptif yaitu analisis regresi linier sederhana dan analisis koefisien Pearson, dari hasil perhitungan yang telah dianalisis oleh peneliti, diperoleh r sebesar 0,7473 dan koefisien determinasi sebesar 55,84%. maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Audit Internal pada PT. KAI (Persero) dinilai cukup memadai, hal ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :
 - Struktur organisasi unit audit internal (SPI) yang berada langsung di bawah direktur utama. Uraian tugas yang dimiliki unit audit internal telah diterapkan oleh pimpinan audit internal, sehingga auditor yang akan melaksanakan pemeriksaan berjalan sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.

- Independensi Audit Internal dapat dilihat dari kedudukan organisasinya, yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga auditor internal dapat menjalankan independensinya secara penuh dan benar.
 - Auditor Internal yang terlibat dalam kegiatan audit memiliki latar belakang pendidikan, kecakapan serta pengalaman yang memadai. Pimpinan Audit Internal menugaskan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini untuk menunjang kemampuan profesional anggota Audit Internal.
 - Audit Internal selalu menyusun program audit yang dilakukan secara periodik. Dan didalamnya terdapat tujuan audit, prosedur audit, sasaran audit, staffing, ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan audit, serta sifat dan luas pengujian audit.
 - Laporan audit dikeluarkan setelah audit selesai dilaksanakan, dan ditujukan kepada Direktur Utama dan Pimpinan objek audit. Dalam laporan hasil audit tersebut, disajikan temuan-temuan Auditor Internal dan rekomendasi atas saran perbaikan yang diperlukan.
 - Auditor Internal menilai kembali tindak lanjut audit terhadap pihak-pihak tertentu yang menurutnya masih kurang cermat dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan melakukan pengawasan dan tindak lanjut manajemen tersebut.
2. Perwujudan *A Good Corporate Governance* pada PT. KAI (Persero) telah berjalan cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari telah

diterapkannya unsur-unsur *A Good Corporate Governance* sebagai berikut:

- Terjalinnnya Mekanisme hubungan kerja yang baik antara Auditor Internal dengan Auditor Eksternal, maka peran yang dijalankan oleh Auditor Internal akan dapat mendukung transparansi yang ada di perusahaan.
 - Akuntabilitas yang memadai, ini terlihat dari adanya evaluasi secara berkala atas pengendalian internal perusahaan sehingga mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif.
 - Pertanggungjawaban terhadap peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
 - Penerapan prinsip kewajaran dapat dilihat dengan posisi Audit Internalnya dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh mengabaikan kepentingan seluruh perusahaan. Audit internal harus mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi kepentingan perusahaan.
 - Penerapan prinsip kemandirian dapat dilihat dari Posisi Audit Internal yang bebas dari pengaruh dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan laporan hasil audit yang obyektif.
3. Pengaruh Audit Internal terhadap perwujudan *A Good Corporate Governance* erat. Hal ini didukung oleh hasil dari koefisien determinasi sebesar 55,84% dan juga didukung beberapa faktor penunjang sebagai berikut :

- Audit Internal berperan dalam menyusun kebijakan *Corporate Governance*.
- Sebagai unit audit perusahaan, Audit Internal bertugas untuk mengawasi perusahaan agar selalu menjalankan praktek-praktek *Corporate Governance*.
- Audit internal mendukung perusahaan agar memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan dalam melaporkan informasi lebih mengenai PT. KAI (Persero).
- Audit Internal melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam penyajian laporan keuangan, agar disajikan secara wajar dan dapat diterima serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Auditor Internal mengingatkan manajemen agar selalu melindungi hak-hak pemegang saham dalam setiap langkah yang diambil.
- Unit Audit Internal mendukung perusahaan agar bertanggungjawab terhadap lingkungan sosialnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, berikut ini adalah saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan bagi perusahaan, sebagai berikut :

1. Kedudukan Head of Unit Audit Internal di dalam struktur organisasi seharusnya terpisah dan tidak sejajar dengan bagian-bagian yang lain yang terdapat di dalam PT.KAI (PERSERO).

2. Dalam pelaksanaan prinsip penerapan A Good Corporate Governance di dalam PT. KAI (PERSERO), harus ada komite audit sesuai dengan keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002.